

103 TAHUN KABUPATEN KARANGANYAR

Pemulihan Ekonomi Disokong UMKM

KPU Sukoharjo Terapkan Prokes di TPS

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menyiapkan sebanyak 12.425 orang Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau KPPS, 15.975 orang Petugas Pemungut Suara atau PPS dan 3.550 orang petugas ketentraman dan ketertiban atau Trantib pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Banyaknya petugas disiapkan dilakukan untuk membantu kelancaran dan penegakan protokol kesehatan mengingat pemilu digelar di tengah pandemi Covid-19. Anggota KPU Sukoharjo Divisi Sosialisasi, Suci Handayani, Rabu (18/11), mengatakan, penyiapan petugas dilakukan tidak hanya bertugas berkaitan dengan soal pilkada saja, namun juga penegakan protokol kesehatan (prokes). KPU Sukoharjo dalam Pilkada 2020 kali ini menyiapkan sebanyak 1.775 TPS tersebar di 12 kecamatan. Tempat tersebut nantinya juga tidak luput dari pengetatan penerapan protokol kesehatan dengan dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu sebelum digunakan. (Mam)

Di RSUD Kardinah Pasien Covid-19 Meningkat

TEGAL (KR) - Penyebaran virus korona di Kota Tegal, meningkat. Di ruang isolasi di RSUD Kardinah Tegal overload hingga Rabu (18/11). Guna mengatasi hal itu manajemen rumah sakit memfungsikan tenda BNPB di depan ruang IGD untuk pasien korona. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, dr Heri Susanto menjelaskan dari 57 ruang isolasi, semuanya sudah penuh. Dampaknya 6 pasien harus mendapatkan perawatan di tenda triage IGD. "Ini sebagai alternatif agar semua pasien dapat dilayani. Mereka ada yang menunggu hasil laboratorium, rontgen, dan ruangan isolasi," ujar Heri. Heri menambahkan, prosedur pelayanan yang dilakukan, setiap pasien yang datang ke IGD akan menjalani pemeriksaan awal untuk screening. Ketika mengarah ke suspek, sementara akan dirawat di tenda. (Ryd)

Kejaksanaan Banjarnegara Gelar Rakor Pakem

BANJARNEGARA (KR) - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) bukan hanya tanggungjawab Kejaksanaan atau Tim Pakem semata. Akan tetapi tanggungjawab semua elemen masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi konflik sosial, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Sehingga, tercipta harmonisasi dan kerukunan kehidupan antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan. Di Kabupaten Banjarnegara terdapat 10 aliran kepercayaan masyarakat. Hingga kini belum ditemukan adanya penyimpangan yang dapat menimbulkan konflik sosial, baik sesama penganut aliran kepercayaan maupun antara penganut aliran kepercayaan dengan masyarakat penganut agama yang ada. "Namun demikian Tim Pakem harus tetap melakukan pengawasan karena disini sifatnya untuk pencegahan akan terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan dalam masyarakat," kata Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Banjarnegara, Yasozisokhi Zebua SH, Selasa (17/11). (Mad)

KARANGANYAR (KR) - Peran pelaku usaha mandiri menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendorong dan memfasilitasi sektor tersebut agar makin berdaya. Demikian disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono, usai upacara Hari Jadi ke-103 Kabupaten Karanganyar di GOR RM Said, Rabu (18/11).

"Tahun ini berat bagi bangsa Indonesia, termasuk Karanganyar. Sedang diuji dengan pandemi Covid-19. Dalam dua tahun ke depan, kita harus berjuang recovery. Berusaha bangkit dari geliat UMKM. Semakin banyak pelaku usaha mandiri, jangan andalkan pe-

modal asing dulu," tandas Juliyatmono.

Menurutnya, Karanganyar yang memiliki potensi agraris, wisata dan budaya harus dimaksimalkan pemanfaatannya dan tidak boleh ditunda lagi. Dalam menyelaraskan potensi itu, pelaku usaha mandiri tidak boleh gampang menyerah. Kepercayaan pasar dibangun dengan kejujuran dan kualitas produk.

"Dari sisi historis, kita memiliki historis luar biasa. Tidak boleh *sembrana*. Jaga ucapan dan perbuatan," pesan bupati. Ia meyakini bumi Karanganyar penuh berkah bagi siapa saja yang memanafaatkannya secara benar. Diceritakannya, sebagian

wilayah Karanganyar sisi barat atau Gondangrejo ditetapkan area purbakala.

Sekarang, klaster tersebut dikonsepsi wisata edukasi. Sedangkan di timur, utamanya Gunung Lawu, menyuplai berbagai manfaat bagi kehidupan seperti air dan hasil bumi.

Tempat itu juga menorehkan sejarah lahirnya Kabupaten Karanganyar. "Jika diresepai maknanya, dapat menyuntik semangat untuk benar-benar membangun Karanganyar," katanya.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan porsi anggaran pada APBD 2021 diakuinya kurang proporsional.

Penurunan pendapatan sampai Rp 130 miliar menyebabkan belanja pemba-



KR-Abdul Alim

Para pimpinan Forkopimda Karanganyar mengenakan beskap dalam upacara Hari Jadi ke-103 Kabupaten Karanganyar.

ngunan timpang.

"Praktis APBD tahun depan dialokasikan pada pelayanan dasar saja. Sedangkan pembangunan fisik dan

belanja modal enggak ada. Meski demikian kita mendorong pemanfaatan teknologi untuk memantik geliat usaha mandiri," katanya. (Lim)

DARI SEMINAR PARAKAN KOTA PUSAKA

Harmonisasi Sosial Keagamaan Jauhkan Konflik

TEMANGGUNG (KR) - Belum pernah terjadi konflik keagamaan di Kota Parakan, sebab warganya mempunyai dinamisasi kehidupan sosial keagamaan yang menyatu dan hidup dalam harmoni, serta mempunyai kedewasaan dalam hidup.

"Parakan menjadi barometer kegiatan keagamaan, ketertiban dan keamanan di Temanggung. Jika ada konflik di Temanggung tetapi Parakan aman, maka Temanggung segera redam dan aman," kata mantan Bupati Temanggung, KH Hasyim Afandi pada seminar Parakan Kota Pusaka, yang digelar untuk memperingati HUT ke-186 Kabupaten Temanggung, Rabu (18/11).

Hasyim Afandi mengemukakan tradisi sosial budaya masih eksis hingga sekarang, sebagai pengikat kehidupan warganya. Sebagai con-

wisata berbasis warga. Ada dua keuntungan yang akan didapat, yakni peningkatan PAD dan kesejahteraan warga Parakan serta Kabupaten Temanggung secara umum. "Dalam kaitan yang lebih luas, untuk menjadikan Kota Temanggung sebagai simpul wisata regional dalam skala regional dan nasional, karena ada pada jarak yang sangat terjangkau terhadap tiga daerah tujuan wisata di daerah tersebut, yakni Borobudur, Dieng dan Gedhong Sanga," katanya.

Dosen Sejarah dan Arkeologi UGM Musadad mengatakan banyak yang perlu digali dari Kota Parakan. Penggalan tidak hanya dari segi warisan tutur, tradisi budaya dan bangunan, tetapi juga penelusuran arsip nasional. "Salah satu pertanyaannya adalah, me-

ngapa Parakan dulu dipilih menjadi ibukota Kabupaten Menoreh, padahal masih banyak daerah strategis di sekitar tempat itu, seperti Magelang dan Secang," katanya.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan pembangunan di Temanggung tidak boleh kehilangan arah maknanya harus menggali sejarah dan tidak melupakannya. Sebab itulah yang membentuk identitas dan karakter sebagai warga Temanggung dan menjadi bekal untuk menata kedepan yang lebih baik. "Sejarah kehidupan di Parakan harus terus digali, baik eksekstensi masyarakatnya dengan kerukunan, ketogotongroyongan maupun jejak arsitekturunya. Bahasa Temanggungan yang tetap eksis juga sebagai warisan tidak ternilai," kata Al Khadziq. (Osy)

HUKUM

Karyawan Dealer Motor Gelapkan Uang

PURWOKERTO (KR) - Disangka telah menggelapkan uang ratusan juta rupiah, La alias Ipung (56) karyawan dealer sepeda motor, diamankan petugas Satreskrim Polresta Banyumas.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas AKP Berry, Rabu (18/11) menjelaskan La warga Kedungbanteng Banyumas, diamankan setelah atasannya melapor ke Polresta Banyumas. "Pelaku diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan saat sebagai karyawan PT Sinar Motor Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses pengurusan STNK dan BPKB," jelasnya.

Kejadian itu berawal pada Agustus 2019 ada tagihan BPKB oleh PT WOM Finance Purwokerto sehingga PT Sinar Motor Indonesia melakukan pengecekan

atau audit ke bagian BPKB dan terdapat temuan bahwa BPKB yang belum diproses sejumlah 162 buah. Kemudian pada tanggal 14 November 2019, La menyerahkan berkas formulir proses BPKB sebanyak dua berkas dan berkas tersebut sudah tidak ada tunggakan biaya, sehingga total BPKB yang belum di proses oleh La adalah sejumlah 160 buah BPKB.

Selanjutnya pada bulan Februari 2020, Branch Manager PT Sinar Motor Indonesia meminta La untuk menyelesaikan kekurangan pengurusan 160 BPKB tersebut. Namun hingga kini, La tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibatnya PT Sinar Motor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 124 juta rupiah. (Dri)

Polres Sukoharjo Bongkar Jaringan Pengedar Narkoba



KR-Wahyu Imam Ibadhi

Delapan tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan di Mapolres Sukoharjo.

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak delapan tersangka pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu ditangkap petugas Polres Sukoharjo.

Total barang bukti yang disita sebanyak 70 gram sabu. Penangkapan dilakukan petugas setelah menerima informasi masyarakat dan melakukan penyelidikan untuk membongkar jaringan tersebut. Kapres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Rabu (18/11), mengatakan Polres Suko-

harjo berhasil membongkar jaringan narkoba jenis sabu yang melibatkan delapan orang tersangka dengan peran berbeda mulai dari pengedar dan pemakai.

Para tersangka yakni AMR (24) warga Gumpang Kartasura, HP (40) warga Banjarsari Solo, GW (46) warga Joyontakan Serengan Solo, AN, warga Semin Gunungkidul, AA, (32) warga Kadilangu Baki, SHP (38) warungkas, Rabu (18/11), D (36) warga Mojosari Po-

lokarto serta BN (47) warga Klumpit Mojolaban.

Kronologis terbongkarnya jaringan narkoba jenis sabu berawal saat Polres Sukoharjo menangkap AMR di Desa Mayang Gatak. AMR berperan sebagai kurir yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu pada pemakai. Petugas dalam penangkapan tersebut mengamankan barang bukti 55 gram sabu.

Berawal dari penangkapan tersebut Polres Sukoharjo kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap AN di Desa Krajan Weru.

"Akhirnya petugas berhasil mengamankan 8 tersangka dan mereka semua merupakan satu jaringan," jelasnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 (2) jo Pasal 112 (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. (Mam)

TEGAKKAN ATURAN PENANGGULANGAN COVID-19 Langgar Prokes, Bayar Denda Rp 50 Ribu

WONOSOBO (KR) - Setelah berulang kali memberikan peringatan, petugas Satpol PP Wonosobo bersama Tim Gabungan TNI-Polri dan petugas Dinas Perhubungan akhirnya melakukan tindakan tegas terhadap warga yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Sedikitnya 53 warga terdapat jaringan operasi prokes, masing-masing diberi sanksi denda sebesar Rp 50 ribu. Kepala Satpol PP Wonosobo Haryono didampingi Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Herman Animoro, Kamis (19/11), menegaskan pemberlakuan sanksi denda tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) No 38 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru di daerah.

Menurutnya, pemberlakuan sanksi denda tersebut tidak langsung serta merta, tapi didahului dengan sosialisasi dilaksanakan selama 3 bulan terakhir. Selama sosialisasi, para pelanggar prokes masing-masing diberi peringatan dan atau hukuman fisik dan kerja sosial sesuai kesanggupan. "Setelah 3 bulan dilakukan sosialisasi, ternyata masih ada warga yang mengabaikan prokes, sehingga penerapan sanksi denda mulai diberlakukan. Warga yang mengabaikan prokes, terutama tidak memakai masker di tempat umum baik pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor maupun penumpang angkutan umum, langsung ditindak tegas diberi sanksi denda," tandasnya.

Penerapan sanksi denda

tersebut, menjadi upaya tegas agar warga tak lagi abai terhadap prokes. Haryono berharap pemberlakuan denda tersebut bisa memberikan efek jera

agar ke depan warga tak lagi melalaikan prokes.

"Sanksi denda tidak serta merta saklak, tapi masih ada kelonggaran bagi warga yang benar-benar tidak memiliki uang. Sanksi bisa diganti dengan hukuman kerja sosial atau menyita sementara kartu identitas diri seperti KTP bersangkutan," ujarnya. (Art)



KR-Ariswanto

Para pelanggar prokes langsung diberi sanksi denda Rp 50 ribu.

HAMIL, DINIKAHKAN DENGAN ORANG LAIN

Bapak Tega Setubuhi Anak Kandung

WATES (KR) - Seorang bapak berinisial J (43) warga Sidorejo Banaran Galur Kulonprogo, diamankan petugas Satreskrim Polres Kulonprogo karena tega menyetubuhi anak kandung, TS (18). Perbuatan bejat tersangka membuat

TS hamil dan telah melahirkan seorang anak.

Waka Polres Kulonprogo, Kopol Sudarmawan, Rabu (18/11), mengungkapkan kasus persetubuhan yang dilakukan tersangka terhadap anak kandung, terjadi dari tahun 2015 hingga

tahun 2016 dengan TKP di rumah tersangka. Kasus ini berawal dari adanya laporan AP (25) warga Bantul.

AP melaporkan bahwa mantan istrinya, TS, dinikahi dalam keadaan sudah hamil 5 bulan. Setelah menikah, pelapor dan TS dilarang berhubungan layaknya suami istri oleh tersangka. Setelah anak yang dikandung lahir, TS mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Wates. Saat ini keduanya telah resmi bercerai.

Penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti, di antaranya keterangan enam orang saksi, barang bukti tiga sasis sampel *bucal swab* atas nama TS, ter-

sangka dan anak TS bernama KJS (4), risalah sidang Pengadilan Agama Wates tanggal 11 Mei 2020 jenis perkara gugat cerai TS dengan AP, hasil visum *et repertum* tanggal 12 September 2020 dan hasil DNA tanggal 20 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa KJS merupakan anak biologis dari TS dan tersangka.

"Tersangka tidak mengakui menyetubuhi anak kandungnya. Namun, penyidik melakukan *scientific crime investigation* dan memperoleh bukti bahwa tersangka adalah pelakunya. TS dan AP dinikahkan hanya untuk menutupi perbuatan bejat tersangka," jelasnya. (M-4)



KR-Dani Ardiyanto

Tersangka J alias Y diamankan di Mapolres Kulonprogo.